

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koordinasi

2.1.1 Pengertian Koordinasi

Istilah Koordinasi berasal dari kata inggris *coordination*. Kata *coordinate* yaitu yang mempunyai arti mengatur. Dengan demikian istilah koordinasi sudah terkandung makna pengaturan. Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling terkait. Dengan kata lain, koordinasi juga dapat di capai atau terjalin bila hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja sebuah bentuk komunikasi administrasi yang mendukung tercapainya koordinasi. Karena itu dikatakan bahwa hasil akhir dari hubungan kerja ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil dan berdaya guna. Leonard D. White dalam Inu Kencana Syafie, Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing – masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoprasikan bagian – bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing – masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.¹

Koordinasi terkadang disebut juga kerjasama, akan tetapi sebenarnya lebih daripada sekedar kerjasama, karena dalam koordinasi juga terkandung sinkronisasi. Sementara kerjasama merupakan suatu kegiatan kolektif dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama, dengan demikian kerjasama tidak dapat terjadi tanpa adanya koordinasi, sedangkan dalam koordinasi pasti adanya upaya kerjasama. Untuk mencapai suatu tujuan yang kolektif perlulah dilakukan koordinasi yang baik sehingga kerja sama yang dilakukan dapat menghasilkan satu tujuan yang sama dan diantara yang melakukan kerjasama bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

¹ Inu, Kencana Syafie. 2011, Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal. 33

Dalam sebuah suatu organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan terlebih dahulu mengenai kegiatan kepada anggota yang di berikan dalam menyelesaikan tugas, karena dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh pimpinan maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaan sesuai dengan wewenang yang diterima. Apalagi mengenai perencanaan pembangunan, harus koordinasi terlebih dahulu. Jika tidak adanya koordinasi maka tujuan perencanaan pembangunan tersebut tidak akan tercapai. Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur – unsur manajemen dan pekerja – pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.² Koordinasi adalah proses pengintegrasikan tujuan – tujuan dan kegiatan – kegiatan pada satuan – satuan yang terpisah (departemen – departemen atau bidang – bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif³.

Koordinasi merupakan suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.⁴ Menurut Hadari Nawawi dalam sumber bukunya Administrasi Pendidikan yaitu bahwa Koordinasi adalah kegiatan mengatur dan membawa personal, metode, bahan, buah pikiran, saran – saran, cita – cita dan alat – alat dalam lingkungan kerja yang harmonis, saling isi mengisi dan saling menunjang sehingga pekerjaan berlangsung efektif dan seluruhnya terarah pada pencapaian tujuan yang sama. Sedangkan Menurut E. F. L Brech dalam bukunya, *The Principle and Prattice of Management* yaitu Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing – masing dan menjaga agar kegiatan itu

² Hasibuan. 2006, *Koordinasi Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 85.

³ T. Hani, Handoko. 2003, *Manajemen Edisi Kedua*, Yogyakarta: BPF. Hal 195.

⁴ Terry. G.R. 2002, *Principle Of Management*, Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 55.

dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.

Sedangkan Menurut Handayani yang mengatakan bahwa koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, Handayani juga mengatakan bahwa koordinasi dan kepemimpinan (*leadership*) adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena satu sama lain saling mempengaruhi. Koordinasi adalah kemampuan melakukan suatu pola gerakan yang membutuhkan keterampilan. Koordinasi juga merupakan bagian integral dari kemampuan motorik, pada kenyataannya pengertian koordinasi telah dianggap sebagai pedoman dari kata kemampuan motorik dan keterampilan.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat di sebutkan bahwa koordinasi ini memiliki syarat – syarat yakni :

- a. *Sense of cooperation*, yaitu perasaan untuk saling bekerja sama , dilihat perbagian.
- b. *Rivalry*, dalam organisasi besar, sering diadakan persaingan antar bagian agar saling berlomba.
- c. *Team spirit*, satu sama lain perbagian harus saling menghargai.
- d. *Esprit de corps*, bagian yang saling menghargai akan makin bersemangat.

Koordinasi memiliki sifat – sifat diantaranya ialah :

- a. Koordinasi adalah bersifat dinamis, bukan statis.
- b. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.
- c. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang manajer dalam mencapai sasaran dan tujuan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat di simpulkan bahwasannya pengertian koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara unit atau satuan - satuan yang terpisah suatu organisasi untuk menciptakan kesatuan dalam mencapai tujuan bersama. koordinasi juga merupakan tindakan seseorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan

pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain.

Koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana, pada dasarnya merupakan salah satu aspek dari pengendalian yang sangat penting. Koordinasi disini suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi, dan bertujuan untuk menyelaraskan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang tepat dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengkoordinasian dimaksudkan agar para pimpinan mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumberdayanya dalam mencapai suatu tujuan. Adanya koordinasi tersebut agar suatu usaha kerja antar badan, instansi dalam melaksanakan tugas dapat saling mengisi, membantu dan saling melengkapi satu sama lain.

2.1.2 Tipe – Tipe, Sifat dan Manfaat Koordinasi

Umumnya organisasi memiliki tipe koordinasi yang dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi – kondisi tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas agar pencapaian tujuan tercapai dengan baik. Tipe koordinasi dibagi menjadi dua bagian yaitu koordinasi vertikal dan horizontal. Makna kedua tipe – tipe koordinasi ini yakni sebagai berikut :

- a. Koordinasi vertikal (*Vertical Coordination*) adalah kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit – unit, kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggungjawabnya secara langsung.

- b. Koordinasi horizontal adalah kegiatan mengkoordinasikan tindakan – tindakan atau kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat. Koordinasi horizontal ini di bagi atas *interdisciplinary* dan *interrelated*. *Interdisciplinary* adalah suatu kegiatan koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan , mewujudkan dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit yang sama tugasnya. Sedangkan *interrelated* yaitu koordinasi antar badan instansi beserta unit – unit yang fungsinya berbeda, akan tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern yang levelnya setaraf.

Hasibuan berpendapat bahwa tipe koordinasi dibagi menjadi dua bagian yaitu koordinasi vertikal dan horizontal. Sifat koordinasi menurut Hasibuan adalah :

- a. Koordinasi bersifat dinamis bukan statis.
- b. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seseorang koordinator dalam rangka mencapai sasaran.
- c. Koordinasi meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Apabila koordinasi dilakukan secara efektif maka ada beberapa manfaat yang didapatkan. Manfaat koordinasi antara lain :

- a. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain, antara satuan – satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi.
- b. Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting.
- c. Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam organisasi.
- d. Menimbulkan kesadaran diantara para pegawai untuk saling membantu.
- e. kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktifitas dalam organisasi.

2.1.3 Fungsi Koordinasi

Menurut Handayaniingrat fungsi koordinasi adalah sebagai berikut :

- a. Koordinasi adalah akibat logis daripada adanya prinsip pembagian habis tugas, yang di mana setiap satuan kerja (unit), hanyalah melaksanakan sebagian tugas pokok organisasi secara keseluruhan.
- b. Sebagai yaitu salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja , motivasi dan serta pengawasan, dengan kata lain koordinasi yaitu adalah merupakan fungsi organik atau suatu fungsi paling penting dari pimpinan.
- c. Untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi. Dan kelancaran mekanisme prosedur kerja ini harus bisa dapat terjamin dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dan dengan menghindari seminimal mungkin perselisihan yang timbul antara sesama komponen organisasi dan mengusahakan semaksimal mungkin kerja sama diantara komponen – komponen tersebut.
- d. Yaitu sebagai usaha yang mengarahkan ataupun menyatukan kegiatan yang mengandung makna adanya keterpaduan (integrasi) yang dilakukan secara serasi dan sinkronisasi dari seluruh tindakan yang dijalankan oleh organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat dan guna melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Hal itu berdasarkan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- e. Sebagai faktor dominan dalam keberlangsungan hidup dalam suatu organisasi pada tingkat tertentu dan yang ditentukan oleh kualitas dari usaha koordinasi yang dijalankan. Serta peningkatan dalam kualitas koordinasi merupakan usaha yang perlu di lakukan secara terus menerus karena tidak hanya masalah teknis semata namun tetapi tergantung dari sikap, tindakan dan maupun langkah dari pimpinan.

2.1.4 Indikator Penelitian

Menurut Hasibuan dalam bukunya Terdapat 4 indikator yang dianggap atau faktor yang mempengaruhi Koordinasi tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Kesatuan Tindakan

Pada hakikatnya koordinasi memerlukan akan kesadaran mengenai setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota dan dengan satuan organisasi lainnya, agar anggota satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri – sendiri. Maka oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan ini adalah merupakan inti daripada koordinasi, kesatuan daripada usaha, yang berarti bahwa pimpinan harus mengatur sedemikian baik rupa usaha – usaha tersebut dari pada tiap kegiatan individu sehingga suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu yang dimaksudkan bahwa kesatuan tindakan usaha itu dapat berjalan dengan baik dan sesuai oleh waktu yang telah direncanakan. Kesatuan Tindakan sendiri merupakan kesatuan dari pada usaha bahwa pimpinan harus mengatur sedemikian rupa usaha – usaha dari setiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian dalam mencapai hasil. Dan didalam pelaksanaannya seorang pemimpin haruslah memiliki usaha – usaha kreatif dan juga harus memiliki inisiatif dalam menyadarkan anggotanya dalam melaksanakan koordinasi. Dan dalam suatu kreatifitas yang di maksudkan tentunya bahwa seorang pemimpin haruslah memiliki kemampuan untuk menciptakan sebuah gagasan – gagasan yang baru dan yang dapat di terapkan dalam pemecahan masalah atau sebai kemampuan untuk melihat hubungan – hubungan baru antar unsur - unsur yang sudah ada sebelumnya, dan kemudian berinisiatif bahwa seorang pemimpin mampu dapat mengembangkan dan memberdayakan sektor kreatifitas daya pikir manusia untuk merencanakan idea atau buah pikiran menjadi konsep yang baru dan yang dapat bermanfaat.

Oleh karena itu konsep tindakan inti dari koordinasi, penguatan kelembagaan organisasi dapat memberikan kesatuan tindakan dalam

menjalankannya. Menurut teori Hasibuan yaitu mengatakan kesatuan tindakan pada lingkup koordinasi dalam pembangunan adalah pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri ini yang dimaksud yaitu berupa adanya suatu kerja sama berdasarkan dengan tugasnya kepada anggota dan satuan organisasi lainnya, agar anggota tersebut tidak berjalan dengan sendiri – sendiri.

b. Komunikasi

Komunikasi Menurut Sutrisno bahwa komunikasi merupakan suatu konsep yang multi makna. Maka komunikasi pada makna ini ada dalam konteks ilmu sosial. Di mana para ahli ilmu sosial melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan komunikasi secara umum dan memfokuskan pada kegiatan manusia serta kaitan pesan dan perilaku. Dan komunikasi merupakan proses yang menghubungkan berbagai komponen – komponen dari organisasi secara bersama. Sedangkan Menurut Handoko yakni menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses pemindahan pengertian atau gagasan ataupun informasi dari seseorang ke orang lain. Dan komunikasi tidak dapat dipisahkan jauh dari yang namanya koordinasi, karena dengan komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat di koordinasikan berdasarkan tentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Dalam setiap organisasi, komunikasi sangat penting diperlukan karena dengan komunikasi maka partisipasi dari anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawannya yaitu harus dengan cara berkomunikasi terlebih dahulu. Komunikasi berasal dari kata *communicare*, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan sesuatu.

Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan adanya sebuah komunikasi maka partisipasi dari anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugasnya kepada karyawan harus dengan komunikasi terlebih dahulu. dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara

komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi. Dari pengertian komunikasi sebagaimana disebutkan di atas terlihat bahwa sebuah komunikasi itu mengandung unsur arti yang bertujuan untuk merubah tingkah laku manusia.

Karena berdasarkan sesuai dengan pengertian dari ilmu komunikasi, yaitu supaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas mengenai azas – azas, dan atas azas - azas tersebut tentu bisa dapat di sampaikan melalui sebuah informasi serta dibentuk pendapat dan sikap. Maka komunikasi tersebut merupakan suatu hal perubahan suatu sikap dan pendapat akibat informasi yang di sampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Sehingga dari uraian tersebut terlihat fungsi komunikasi yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai alat kendali ataupun kontrol. Dan dalam hal ini alat kendali maka berarti dengan komunikasi baik perilaku individu bisa dapat dikontrol dengan penyampaian aturan yang harus dipatuhi.
2. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kejadian dalam suatu lingkungan.
3. Menginterpretasikan terhadap informasi mengenai lingkungan.
4. Kegiatan mengkomunikasikan informasi , nilai dan norma sosial dari generasi yang satu kegenerasi yang lain.

Dan dari sebab itu komunikasi merupakan suatu upaya yang di lakukan oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui informasi atau pendapat dan ataupun pesan , ide yang di sampaikan kepada orang tersebut. Jadi dapat di tarik kesimpulan yang di maksud komunikasi adalah proses interaksi antara pimpinan dan karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam mencapai suatu tujuan.

c. Pembagian Kerja

Menurut Hasibuan yaitu mengenai pembagian kerja adalah pengelompokan tugas – tugas , pekerjaan – pekerjaan ataupun kegiatan yang sama kedalam satu unit kerja dan hendaknya di dasarnya di dasarkan pada atas eratnya suatu hubungan pekerjaan tersebut. Secara teoritis tujuan dalam suatu

organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri.

Kelompok dua orang ataupun lebih yang bekerja bersama secara kooperatif dan kemudian di koordinasikan agar dapat mencapai hasil lebih dari pada di lakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, pada tiang dasarnya adalah melakukan prinsip pembagian kerja. Untuk Pembagian Kerja di gunakan indikator – indikator sebagai berikut :

1. Penempatan Pegawai

Penempatan Pegawai yaitu bahwa setiap pegawai atau karyawan apa sudah di tempatkan sesuai dengan kemampuannya, dan berdasarkan keahlian yang dimiliki. Sebab jika ketidak tepatan ataupun salah menetapkan suatu posisi pegawai maka akan menyebabkan jalannya pekerjaan menjadi kurang lancar dan tidak maksimal.

2. Beban Kerja

Beban Kerja yang dimaksud yaitu suatu pembagian pekerjaan yang dipercayakan untuk di kerjakan dan dengan di tanggungjawabkan oleh satuan organisasi atau pegawai tertentu.

3. Spesialisasi Pekerjaan

Spesialisasi Pekerjaan merupakan pembagian kerja berdasarkan keahlian yang dimiliki dan keterampilan khusus.

Prinsip pembagian kerja ini adalah yaitu maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya melakukan pembagian kerja terlebih dahulu. Dengan pembagian kerja ini di harapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi.

Pembagian kerja juga merupakan perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi dapat bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Jadi pembagian kerja menyebabkan kenaikan efektifitas secara dramatis, karena tidak seorangpun secara fisik dapat mampu melaksanakan keseluruhan aktifitas dalam tugas yang paling rumit dan tidak seorangpun juga memiliki semua keterampilan yang di perlukan

untuk melaksanakan berbagai tugas. Oleh karena itu perlu diadakan pemilihan bagian – bagian tugas dan membagi kepada sejumlah orang. Dan pembagian dalam pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi ahli pada fungsi pekerjaan tertentu.

d. Disiplin

Menurut Hasibuan dalam bukunya bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan yang di berikan oleh instansi kepada karyawannya dan berdasarkan norma – norma sosial yang berlaku. Tanpa adanya sikap kedisiplinan ini dari seorang karyawan maka perusahaan tidak akan berjalan dengan baik, dan perusahaan juga sulit untuk mewujudkan tujuannya. Dalam usaha meningkatkan efisein dan efektifitas untuk pencapaian tujuan maka organisasi pemerintahan maka disiplin pegawai ini merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan. Karena kelancaran dari tugas pekerjaan yang ada dalam sebuah organisasi salah satunya yaitu ditentukan oleh kondisi disiplin pegawainya. Budaya kerja merupakan aspek penting penentu sikap kerja seorang pegawai baik itu kinerja, keputusan kerja, maupun tingkat budaya kerja aparat pemerintah daerah adalah disiplin kerja. Disiplin kerja merupakan ketaatan pada peraturan - peraturan yang berlaku dalam proses pelaksanaan kerja. Sedangkan disiplin kerja adalah kepatuhan dan kesetiaan terhadap pekerjaan dan juga rasa tanggungjawab penuh terhadap apa yang di kerjakan. Namun pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar, masing – masing dapat menghasilkan hasil yang di harapkan.

Disiplin ini yang di maksudkan untuk penyesuaian bagian – bagian waktunya, sehingga masing – masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itu diperlukannya disiplin. Dalam suatu organisasi penerapan peraturan kepada seseorang atau anggota organisasi dikelola oleh pemimpin. Pemimpin sendiri harus mampu menerapkan konsep disiplin ini, karena positif yakni penerapan peraturan melalui kesadaran bawahannya. Dan sebaliknya bila pimpinan tidak mampu menerapkan konsep disiplin positif pada dirinya sendiri tentu dia juga

tidak bakalan mungkin mampu untuk menerapkannya pada orang lain termasuk kepada bawahannya. dengan demikian disiplin itu sangat penting dalam proses pencapaian tujuan yang dimaksud.

2.2 Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses rangkaian urutan rasional di dalam penyusunan rencana, untuk memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya swasta secara bertanggungjawab dan perencanaan merupakan suatu program yang menjelaskan hubungan grafis organisasi secara kolektif yang menunjukkan sasaran apa yang hendak dicapai. Perencanaan bagi setiap organisasi merupakan pemandu dalam berbagai aktivitas organisasi, maka perencanaan sebagai langkah awal yang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan organisasi.

Perencanaan yang baik selalu diupayakan oleh setiap organisasi dengan diharapkan akan mempermudah dalam setiap langkah – langkah kerja kedepan, perencanaan merupakan begitu penting bagi organisasi, sehingga setiap organisasi akan membuat perencanaan sebaik – baiknya, baik perencanaan tingkat koorprasi, tingkat departemen dan operasional. Perencanaan merupakan suatu proses pemilihan alternatif tindakan yang terbaik untuk mencapai tujuan organisasi.⁵

Perencanaan juga merupakan suatu proses rangkaian urutan nasional didalam proses penyusunan rencana, untuk memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya swasta secara bertanggung jawab.⁶ Konsep suatu perencanaan berdasarkan sesuai dengan kewenangan daerahnya dan berhak dalam menyusun rencana pembangunan didaerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah tersebut idealnya dikoordinasikan, disinergikan, dan

⁵ Susatyo Herlambang. 2013. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Pustaka Baru. Hal. 45

⁶ Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Perencanaan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat. Hal. 3.

diharmoniskan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan dapat di definisikan sebagai penentuan tindakan yang akan dilaksanakan pada masa mendatang yang tujuannya untuk mencapai apa yang diinginkan. Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinue, meliputi dua aspek yaitu rencana dan pelaksanaannya. dalam melaksanakan proses perencanaan harus dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian akuntabilitas juga berarti menyelenggarakan perhitungan terhadap sumber daya yang digunakan dan adanya konsistensi terhadap hasil perencanaan yang sudah disepakati dengan pelaksanaan bersama harus di jaga dan juga dipelihara. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional maka perencanaan pembangunan daerah harus bersifat menyeluruh, sehingga mampu membangun sistem perencanaan pembangunan dengan melalui :⁷

1. Pendekatan Teknokratik

Pendekatan teknokratik menggunakan metode serta kerangka berpikir secara ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

2. Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap sebuah pembangunan.

Dengan demikian pendekatan partisipatif mensyaratkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat. untuk turut serta menentukan perencanaan pembangunan dalam sebuah hubungan yang didasarkan pada bentuk kemitraan dengan pemerintah. Sejauh mana mereka dalam proses perencanaan tersebut.

3. Pendekatan Politis

Yaitu dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama. pendekatan ini memandang bahwa proses dalam penyusunan rencana haruslah erat kaitannya dengan proses politik.

⁷ Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 157.

Perencanaan yang dilakukan pemerintah akan berisi rencana strategis pemerintah yang akan berlangsung selama masa kerjanya.

4. Pendekatan atas – bawah dan bawah atas

Perencanaan yang dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan dari bawah keatas dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang harusnya diikuti karena dipandang sebagai kebutuhan nyata. Perencanaan dari atas kebawah yaitu pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk kedalam rencana rinci.

Adapun dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas 3 bentuk :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada rancangan pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) dan rencana tata ruang wilayah.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Merupakan penjabaran visi misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan , pembangunan daerah, serta program perangkat daerah dan keuangan daerah.

Dan serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang di sertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun .

3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah , prioritas pembangunan daerah , serta rencana kerja ini disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat.

Berdasarkan uraian diatas dapat di kemukan bahwa perencanaan ini yaitu merupakan tahapan penting dan kritis dalam proses pembangunan sehingga pada proses ini harus di lakukan dengan di dukung oleh data – data

yang memadai. perencanaan ini pun sebagai suatu kebijakan publik dan merupakan proses kegiatan usaha yang dilakukan secara terus menerus dan komprehensif serta memiliki tahapan yang sistematis. Dan dalam penerapan perencanaan haruslah terukur secara konkret sehingga sasaran yang akan di capai menjadi lebih jelas, Karena dalam suatu perencanaan pembangunan akan menentukan arah pembangunan daerah maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu kedepan.

2.3 Pembangunan

Pembangunan adalah yaitu di bentuk dari hasil kegiatan dan program pemerintah bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial dan lainnya dengan cara meningkatkan pembangunan tersebut. Dan pembangunan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangkaian pembinaan bangsa.⁸ Dapat di simpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha dan kegiatan dalam melakukan suatu perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik dari sebelumnya ke arah kemajuan secara berkesinambungan.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam pembangunan berdasarkan dalam UUD 1945 bahwa yaitu kesejahteraan sosial merupakan hak seluruh bangsa indonesia. pembangunan yang dilaksanakan baik secara Nasional dan ataupun pada daerah harus dapat menjangkau dan dapat dinikmati oleh seluruh bangsa indonesia. sebagai wujud dari perlindungan terhadap seluruh bangsa indonesia. maka pemerintah republik indonesia ini di harapkan untuk mampu mendistribusikan sebuah pembangunan dan hasil – hasilnya secara merata kepada seluruh daerah dan seluruh lapisan masyarakat. pembangunan secara umum dapat diartikan juga sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali kemajuan yang di maksud yaitu kemajuan material. Dan seringkali di artikan sebagai kemajuan yang di capai oleh

⁸ Sondang P. Siagan. 2009, *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 4

masyarakat di bidang ekonomi. Sedangkan dalam suatu pelaksanaan pembangunan maka sangat diperlukan dengan adanya strategi – strategi pembangunan agar pembangunan ini sesuai dengan perencanaan . Maka berdasarkan secara umum, bahwa pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh para bikrorat untuk membuat suatu perubahan sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

1.4 Perencanaan Pembangunan Daerah

Suatu perencanaan pembangunan yaitu merupakan suatu tahapan yang awal dalam setiap proses pembangunan. dan sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan ini akan menjadi suatu pedoman dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Perencanaan Pembangunan ini juga dapat di artikan sebagai suatu arahan dalam penggunaan sumber - sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan – tujuan keadilan sosial ekonomi yang lebih baik. Di negara indonesia yang berkembang ini perencanaan yang matang sangat diperlukan untuk membangun suatu daerah karena pembangunan daerah dan ini merupakan bagian internal dalam perencanaan pembangunan maka dalam penyusunan perencanaan yang matang ini tentunya sangat penting di perluka

Dan alasannya karena potensi yang dimiliki oleh setiap daerah itu terkadang beda – beda baik dari segi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi ekonomi, sosial dan budaya. Maka selain itu, alasan lain yang cukup penting yaitu bahwa setiap pada perencanaan pembangunan nasional, maka peranan pemerintah daerah tidak terlalu menonjol seperti sama halnya dengan pemerintah pusat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan daerah fungsi peran utamanya yaitu adalah pemerintah daerah itu sendiri.

Berdasarkan dari definisi tersebut terlihat jelas bahwa komponen utama dari perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah :

1. Merupakan suatu usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalikan dan mengatur proses dalam pembangunan.

2. Mencakup periode jangka panjang, menengah, dan tahunan.
3. Menyangkut dengan variabel – variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Mempunyai suatu sasaran pembangunan yang jelas dan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Tujuan dari perencanaan pembangunan daerah itu sendiri yaitu untuk menyusun suatu rencana dan yang merupakan pegangan ataupun acuan pada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan yang di dasarkan pada kemampuan dan potensi sumber daya alam, serta peluang ekonomi yang ada dan sedangkan manfaat yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan kualitas ataupun taraf hidup masyarakat sehingga kehidupan lebih baik dari sebelumnya dan daerah dapat berkembang secara cepat dan berkelanjutan. salah satu tujuan pembangunan daerah juga yaitu adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai alat ukur bagi keberhasilan pembangunan. Peningkatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi selanjutnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Maka pembangunan yang ingin dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan dekonomi daerah tersebut harus memperhatikan baik kondisi ekonomi masyarakat yang ada, potensi sumber daya alam dan manusia, dan infrastruktur yang tersedia. Dengan mempertimbangkan segala aspek – aspek tersebut selanjutnya kemudian disusun perencanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan dengan kewenangan yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan juga berdasarkan aspirasi dari masyarakat untuk menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya tersebut. Dan pembangunan daerah yang dilaksanakan akan membawa prospek baik bagi suatu pertumbuhan ekonomi daerahnya. Kemudian dengan akhirnya untuk mencapai suatu hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kapasitas serta partisipasi dari para stakehoulders didaerah, baik serta keseriusan dan juga kerelaan pusat memberikan pembinaan dan dukungan. Tanpa keterlibatan para

stakeholders dan dukungan pusat tersebut akan sulit bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk menuju terwujudnya sebuah pertumbuhan ekonomi daerah.

2.5 Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka setiap daerah harus perlu menyelenggarakan suatu forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, di mulai dari tingkat desa / kelurahan, kecamatan, kabupaten / kota, sehingga tingkat propinsi, termasuk menyelenggarakan forum satuan kerja perangkat daerah (Forum SKPD). Dan sedangkan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Pusat yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan nasional. Maka semua masukan yang diperoleh dari Musrenbang secara berjenjang ini diperlukan karena akan mempengaruhi kegiatan pembangunan yang berkait dengan pendanaan ataupun anggaran untuk kegiatan pembangunan di daerah.

Tahapan dalam sistem perencanaan nasional adalah :

1. Tahap Persiapan Perencanaan.
2. Tahap Persiapan dan Anggaran.
3. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Belanja Negara.
4. Tahap Pelaporan dan Pertanggung jawaban.

Tahap perencanaan tersebut melalui 2 tahapan sebagai berikut :

1. Penjaringan aspirasi masyarakat yaitu melalui Musrenbang dari tingkat Desa ataupun Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan.
2. Penentuan arah dan kebijakan melalui Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari tingkat Kabupaten Kota sampai dengan tingkat Provinsi.

Tahapan persiapan perencanaan :

Pada tahap ini Kepala Pemerintahan baik pada tingkat Desa / Lurah hingga Nasional menetapkan Tim penyelenggara Musrenbang. Tim inilah yang akan menyusun jadwal serta agenda Musrenbang, mengumumkan atau mengundang minimal 7 hari sebelum kegiatan dilaksanakan agar peserta dapat melakukan pendaftaran. Tim ini juga yang akan menyiapkan materi serta notulen pertemuan.

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) ini menjadi forum untuk menjaring aspirasi dari masyarakat. Untuk persiapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai ketua tim penyelenggaraan forum.

Tim inilah yang akan menyusun daftar prioritas yang telah ditetapkan dari Musrenbang Kecamatan, mengidentifikasi daftar prioritas serta memperkirakan biaya tiap prioritas kegiatan yang selama ini lebih dikenal sebagai arah dan kebijakan umum. Selain itu, tim juga akan mengumumkan atau mengundang calon peserta minimal 7 hari sebelum kegiatan.

Peserta adalah mereka yang menjadi delegasi Musyawarah rencana pembangunan kecamatan maupun kelompok – kelompok masyarakat yang bekerja dalam bidang yang terkait berdasarkan dengan fungsi ataupun SKPD pada tingkat kabupaten / kota. Dan Penjaringan Aspirasi ini dari masyarakat dilakukan yaitu melalui suatu Wadah Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Setelah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menerima semua saran dari melaksanakan kegiatan Musrenbang tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ogan Komering Ulu Timur ini barulah menyusun yang namanya APBD.

**Tabel. 2.6 Mekanisme Proses Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Penganggaran Tahunan**

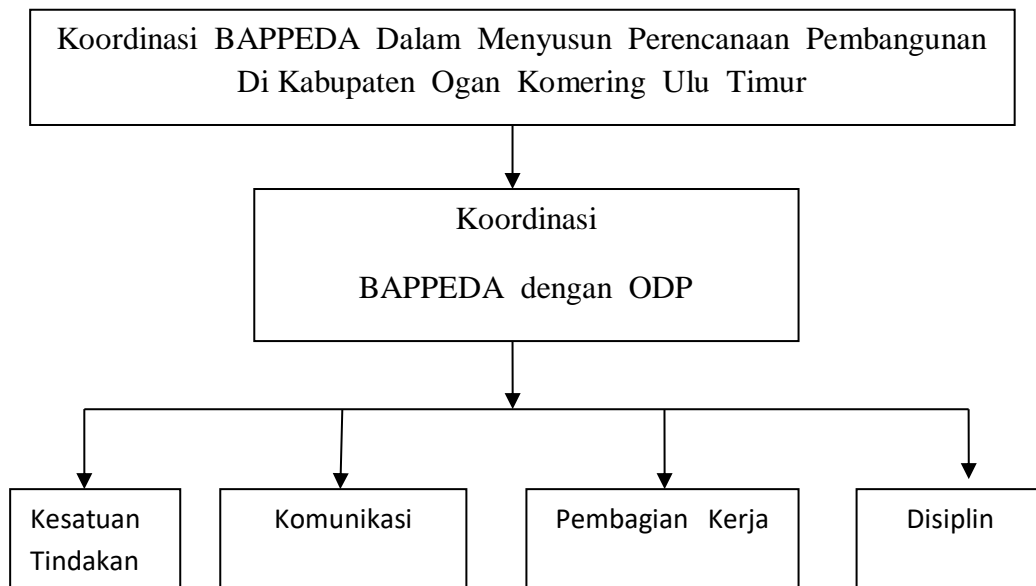


Sumber: <https://bappeda.go.id>, diakses 02 januari 2023

2.6 Kerangka Pikir

Adapun struktur kerangka berpikir yang peneliti buat sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



**Sumber Teori : Hasibuan Dalam Bukunya Manajemen Dasar - Dasar
Pengertian, dan Masalah (2006 : 88) Koordinasi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Menyusun
Perencanaan Pembangunan**

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terlebih dahulu membawa keuntungan bagi peneliti, agar dapat menghindarkan adanya duplikasi pada tema penelitian. Penelitian – penelitian yang berkaitan tentang koordinasi yang dilakukan peneliti dalam beberapa hal dalam memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian – penelitian yang telah dilakukan.

1. Akbar Taufik (2017) “ Fungsi Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017”. Pada penyelenggaraan antara koordinasi ditingkat staf antara KPU dan Panwaslu ketika permintaan data oleh Panwaslu sudah oke dengan komisioner KPU minta dokumen ini dan itu, begitu Panwaslu utus staf ke KPU untuk mengambil dokumen itu, namun terdapat adanya staf disananya tidak nyambung dan tidak mau memberikan dokumen dengan berbagai alasan. Dengan terjadinya permasalahan – permasalahan diatas, tentu saja hal ini menjadi permasalahan koordinasi KPU dan Panwaslu dalam menyelenggarakan pemilihan walikota dan wakil walikota pekanbaru tahun 2017, adapun tujuan penelitian, untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menghambat Koordinasi KPU dan Panwaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Wakil walikota dan Walikota Pekanbaru Tahun 2017.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peran koordinasi Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu dalam menyelenggarakan pemilihan walikota dan wakil walikota Pekanbaru 2017 indikator kesatuan tindakan merupakan kesadaran diri untuk bekerja sama sudah dilaksanakan oleh kedua lembaga, indikator komunikasi sudah ada komunikasi antar kedua lembaga, indikator pembagian kerja sudah dilaksanakan oleh kedua lembaga, indikator disiplin sudah dilaksanakan oleh kedua lembaga. Dengan itu penulis menyimpulkan hasil keseluruhan penelitian cukup baik.

Berdasarkan persamaan yang terdapat pada penelitian ini terletak pada suatu indikator penelitian yaitu indikator komunikasi, pembagian kerja dan disiplin. Perbedaannya terletak pada penelitian Akbar Taufik yang dimana dalam kesatuan tindakan dari staffnya kurang baik karena masih terdapat adanya kerjasama dan menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dan penelitian ini dalam kesatuan tindakan sudah cukup baik antar organisasi sudah ada kesadaran untuk bekerjasama dan menggunakan penelitian kualitatif.

2. Kasmil (2018) “ Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Dalam Menunjang Pelaksanaan Pembangunan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kendari”. Agar proses pembangunan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka salah satu aspek yang diperhatikan adalah koordinasi daripada aparat pelaksana pembangunan . koordinasi sebagai salah satu cara untuk mzemperatkan usaha dari setiap penanggungjawab pelaksanaan pembangunan yang ada di suatu daerah guna menggalakan proses pembangunan terutama pembangunan yang sesuai dengan tuntunan otonomi daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dari pelaksanaan pembangunan pada suatu daerah dapat tercapai. Adapun tujuan penelitian, mengetahui pelaksanaan Koordinasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kendari, mengetahui keberhasilan pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kendari.

Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi pada Kantor Bappeda Kota Kendari telah terlaksana dengan baik. hal ini ditinjau dari pelaksanaan koordinasi vertikal oleh Kepala Bappeda kota kendari selaku pimpinan pada Kantor Bappeda kota Kendari telah terlaksana dengan baik yakni telah melakukan Koordinasi dengan Walikota kota kendari. tentang adanya pelaksanaan program kerja

maupun program pembangunan kepada para pegawainya begitupun dengan koordinasi horizontal yang dilakukan para pegawai dalam mengkoordinasikan berbagai pelaksanaan tugas pada unit kerja pada Kantor Bappeda kota Kendari telah terlaksana dengan baik, yakni adanya pengarahan, penyelarasan, dan mengintegrasikan program pembangunan antara SKPD Pemerintah kota Kendari, Camat dengan Para Lurah dan tokoh masyarakat kota Kendari tentang pelaksanaan berbagai program kerja pada kota Kendari.

Dan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah juga telah terlaksana dengan baik. hal ini juga telah ditelisik dari pelaksanaan pembangunan fisik berupa pembangunan jalan maupun nonfisik yang berupa peningkatan moral , disiplin masyarakat dan pembinaan mental spritual telah terlaksanakan dengan baik.berdasarkan hasil penelitian terdahulum, maka penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Namun pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada Badan Perencanaan Pembangunan dalam melakukan koordinasi untuk meningkatkan upaya perencanaan pembangunan daerah dan perbedaan dalam hasil penelitian koordinasi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik namun dalam hal ini peneliti masih terdapat permasalahan mengenai kegiatan koordinasi yang dilakukan yaitu dimana masih terdapat adanya kendala ataupun hambatan dalam kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan dan masih terdapatnya para staff organisasi pegawai yang masih terlambat dalam mengikuti kegiatan koordinasi. metode penelitian ini yang digunakan yaitu sama – sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian Kasmil.